

**SKRIPSI**

**PENGANGKATAN PENYANDANG DISABILITAS MENJADI CALON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADAAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKHRUL AGMI**

**1610113048**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)**



**Pembimbing :**

**Hj Sri Arnetti, S.H., M.H**

**Titin Fatimah, S.H., MH**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

# **PENGANGKATAN PENYANDANG DISABILITAS MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**Fakhrul Agmi, 1610113048, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum,  
Universitas Andalas, 69 Halaman, Tahun 2020**

## **ABSTRAK**

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal ini memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja pada instansi pemerintahan tanpa ada diskriminasi. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan pelaksanaan manajemen ASN yang menggunakan sistem merit. Sistem merit berlaku mulai dari tahapan pengadaan hingga pensiun. Dengan diberlakukannya sistem merit ini memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam bekerja pada instansi pemerintah. Namun dalam penerapan pengadaan penyandang disabilitas menjadi CPNS pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Solok Selatan masih terdapat diskriminasi yang menyebabkan dibatalkannya pelamar penyandang disabilitas. Permasalahan yang dibahas yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan pengangkatan penyandang disabilitas menjadi CPNS pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Solok Selatan. 2) bagaimana kendala dalam pelaksanaan pengangkatan penyandang disabilitas menjadi CPNS dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS di Kabupaten Solok Selatan diawali dengan tahapan Perencanaan, Pengumuman lowongan, Pelamaran, Seleksi, Pengumuman hasil, Pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan masa percobaan calon pegawai negeri sipil. Jika merujuk pada kewajiban pemerintah mempekerjakan penyandang disabilitas dalam minimal 2% tidak terpenuhi dalam penerimaan ini. Aturan tersebut dinilai hanya formalitas karena tidak adanya sanksi tegas. Tidak terpenuhinya 2% ini karena minimnya aksesibilitas yang ada di Kabupaten Solok Selatan karena tergolong daerah baru, sehingga pembangunan lebih difokuskan pada pembangunan sarana umum dan prasarana lainnya. Adapun permasalahan diskriminasi yang timbul dapat terselesaikan secara mediasi. Upaya penyelesaian ini dianggap lebih efektif dan tidak memakan waktu lama agar permasalahan dapat diselesaikan karena menggunakan prinsip kesepakatan.

**Kata Kunci:** Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Penyandang Disabilitas

